

Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Industri Halal: Perspektif Etika, Sains, Ekonomi, dan Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan

Nuryanti

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: nuryanti76@gmail.com

Abstrak (IND) Industri halal telah mengalami pertumbuhan global yang pesat, tetapi tantangannya melampaui aspek ekonomi. Penelitian ini mengkaji peran etika, sains, ekonomi, dan politik dalam mendukung keberlanjutan sektor ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa mengoptimalkan potensi industri halal memerlukan sinergi antara nilai-nilai etika, inovasi ilmiah, kekuatan ekonomi, dan kebijakan politik yang mendukung. Dimensi etika memastikan praktik yang adil dan berkelanjutan, sains mendorong kemajuan teknologi untuk efisiensi dan transparansi, ekonomi mendorong pertumbuhan pasar, dan politik memberikan regulasi yang jelas. Sinergi antara dimensi-dimensi ini akan memperkuat posisi industri halal secara internasional, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan seperti pemahaman etika yang terbatas, akses teknologi, dan regulasi yang tidak konsisten.

Abstract (ENG) The halal industry has experienced rapid global growth, but its challenges extend beyond economic aspects. This research examines the roles of ethics, science, economics, and politics in supporting the sustainability of this sector. Using a qualitative approach, the study's findings indicate that optimizing the potential of the halal industry requires synergy between ethical values, scientific innovation, economic strength, and supportive political policies. The ethical dimension ensures fair and sustainable practices, science drives technological advancements for efficiency and transparency, economics fosters market growth, and politics provides clear regulations. The synergy between these dimensions will strengthen the halal industry's position internationally, promote sustainable development, and address challenges such as limited ethical understanding, technology access, and inconsistent regulations.

Keywords: Islamic Education Values, Halal Industry, Ethics, Science, Economics, and Politics.

PENDAHULUAN

Industri halal telah menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan paling pesat di dunia, mencerminkan daya tarik globalnya yang melampaui batas agama dan budaya. Nilai pasar industri ini diperkirakan mencapai triliunan dolar, mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan produk halal yang tidak hanya berasal dari konsumen Muslim, tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang mengapresiasi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang sering kali diasosiasikan dengan produk bersertifikat halal. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan signifikan populasi Muslim dunia, yang mana pada tahun 2023 Islam memiliki 2,18 miliar penganut, yang membentuk sekitar 27% populasi dunia (Kamiliyah, 2024). Kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya produk yang sesuai dengan nilai-

nilai syariah, baik dalam proses produksi maupun distribusinya, semakin menempatkan industri halal sebagai sektor strategis yang tidak dapat diabaikan dalam perekonomian global (Aulia & Fasa, 2021). Integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kebijakan ekonomi moderen menjadi topik penting untuk dikaji, mengingat tantangan global seperti ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis lingkungan (Hakim & Nuryadin, 2024). Hal tersebut tentu patut menjadi perhatian penting untuk ekonomi berkelanjutan yang modern namun tetap berada dalam lingkup nilai-nilai pendidikan islam yang terimplementasi secara efektif dan efisien.

Namun, melihat industri halal hanya dari sudut pandang ekonomi saja tidak cukup untuk memahami kompleksitas dan tantangannya. Perkembangan industri ini juga erat kaitannya dengan dimensi etika, sains, dan politik, yang semuanya memiliki peran penting dalam menentukan keberlanjutan dan legitimasi sektor ini. Dari sisi etika, industri halal tidak hanya berkuat pada pemenuhan standar halal semata, tetapi juga menyentuh isu-isu yang lebih luas, seperti keadilan dalam rantai pasok, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh, kritik terhadap praktik penyembelihan hewan dalam industri halal menyoroti kebutuhan untuk memperhatikan kesejahteraan hewan secara lebih serius, tanpa mengabaikan aspek syariah. Selain itu, transparansi dalam bisnis halal menjadi sorotan karena adanya kekhawatiran terkait sertifikasi palsu atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dapat dipahami secara seksama bahwa industri halal telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Istilah "halal" berasal dari bahasa Arab yang berarti "diizinkan" atau "boleh" (Wijayanti & Meftahudin, 2018). Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan etika kerja individu, terutama dalam industri halal. Beberapa nilai pendidikan Islam yang relevan dan aplikatif dalam konteks industri halal.

Pertama-tama, nilai kejujuran adalah pondasi utama dalam pendidikan Islam yang sangat diperlukan dalam industri halal. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab: 70). Dalam lingkungan industri halal, kejujuran dalam pemasaran, produksi, dan distribusi produk halal sangatlah vital (Istikomah & Rofi, 2021). Masyarakat semakin kritis terhadap label halal, sehingga produsen dituntut untuk bersikap transparan dan jujur mengenai asal usul dan proses bagaimana produk mereka diproduksi. Kejujuran tidak hanya memperkuat reputasi perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan di antara konsumen.

Selain itu, nilai tanggung jawab sosial juga merupakan aspek penting dalam pendidikan Islam yang berkontribusi pada pengembangan industri halal. Islam mengajarkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk halal, pelaku industri dituntut untuk tidak hanya memproduksi barang yang halal, tetapi juga aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta memberi manfaat bagi orang lain (Nurulloh, 2019). Produksi halal yang mengedepankan prinsip-prinsip ini akan menciptakan ekosistem industri yang lebih berkelanjutan dan beretika.

Pengembangan karakter juga merupakan nilai penting lainnya yang diajarkan dalam pendidikan Islam (Jannah, 2023). Karakter yang baik, seperti kedisiplinan, kerja keras, dan integritas, sangat dibutuhkan dalam industri halal. Seorang pekerja yang memiliki karakter yang kuat akan lebih mampu menghadapi tantangan dan menemukan solusi kreatif dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa kesuksesan tidak

hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari kualitas akhlak dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam industri halal bukan hanya berdampak pada keberhasilan komersial, tetapi juga pada pencapaian tujuan moral dan sosial. Dalam menciptakan industri halal yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab, penting bagi pelaku industri untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, serta pengembangan karakter. Dengan demikian, industri halal dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan beretika. Semoga dengan penerapan nilai-nilai ini, industri halal dapat tumbuh dengan harmonis dan memberikan manfaat yang luas bagi umat manusia.

Dari perspektif sains, inovasi teknologi memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan industri halal. Teknologi seperti *blockchain* telah digunakan untuk memastikan transparansi dan keaslian produk halal melalui pelacakan rantai pasok yang lebih akurat (Iqbal & Ahmad, 2024). Selain itu, riset terhadap bahan baku halal, seperti pengembangan gelatin berbasis nabati sebagai alternatif bahan yang berasal dari babi, menunjukkan bagaimana sains dapat menjadi solusi terhadap tantangan dalam industri ini. Penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi kandungan non-halal dalam produk juga mencerminkan bagaimana teknologi modern dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

Dari sudut pandang ekonomi, potensi industri halal sangat besar, tidak hanya bagi negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga bagi negara-negara non-Muslim yang mulai melihat sektor ini sebagai peluang bisnis. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy 2023*, pengeluaran konsumen Muslim untuk produk halal diproyeksikan tumbuh rata-rata 9,1% setiap tahun, dan diperkirakan total pengeluaran Muslim akan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2025 (Kamiliah, 2024). Hal ini tentunya menciptakan peluang pasar yang sangat besar. Namun, pertumbuhan ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya harmonisasi standar halal di berbagai negara, yang sering kali menghambat perdagangan internasional.

Sementara itu, dari sisi politik, regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki peran signifikan dalam mendukung atau justru menghambat perkembangan industri halal. Di Indonesia, misalnya, keberadaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi negara sebagai pemain utama dalam industri halal *global*. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesiapan infrastruktur dan sertifikasi yang sering kali dianggap membebani pelaku usaha kecil dan menengah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya *research gap* atau perbedaan hasil penelitian yang ditemukan dalam beberapa kajian terkait integrasi dimensi etika, sains, ekonomi, dan politik dalam pengembangan industri halal. Dalam jurnal Difa Ameliora Pujayant (2020), meskipun dibahas mengenai hubungan antara industri halal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), fokus utama penelitian ini lebih menyoroti dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, tanpa menguraikan secara rinci integrasi dimensi etika dan sains dalam pengembangan industri halal. Hal serupa juga ditemukan dalam jurnal Bahtiar Adamsah dan Ganjar Eka Subakti (2020), yang menekankan peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung industri halal, namun tidak memberikan pembahasan mendalam mengenai dimensi etika dan sains, serta peran teknologi dalam mendukung keberlanjutan industri halal. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara holistik bagaimana integrasi nilai-nilai etika, inovasi teknologi berbasis sains, strategi ekonomi, dan kebijakan politik dapat mendukung pengembangan industri halal yang berkelanjutan. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-

nilai etika dan teknologi, yang belum dibahas secara mendalam dalam kedua artikel tersebut, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian ini.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penelitian ini hendak mengkaji 1) Bagaimana integrasi dimensi etika, sains, ekonomi, dan politik dapat mendukung pengembangan industri halal yang berkelanjutan? dan 2) Apa saja tantangan yang dihadapi industri halal dalam mengimplementasikan nilai-nilai etika, inovasi teknologi, strategi ekonomi, dan harmonisasi kebijakan politik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan?. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis integrasi dimensi etika, sains, ekonomi, dan politik dapat mendukung pengembangan industri halal yang berkelanjutan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai etika, inovasi teknologi, strategi ekonomi, dan harmonisasi kebijakan politik guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Studi ini bersifat kepustakaan dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah serta dokumen lain yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis untuk menghasilkan uraian deskriptif berupa teks yang diperoleh dari jurnal dan medis internet yang dikaitkan dengan objek penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. (Kaharuddin, 2021). Reduksi data dilakukan dengan menyaring seluruh data, menyederhanakannya, dan memilih data yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi dikelompokkan berdasarkan kategori yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu integrasi dimensi etika, sains, ekonomi, dan politik sebagai pendukung pengembangan industri halal yang berkelanjutan. Tahap akhir adalah verifikasi data untuk menarik kesimpulan, di mana interpretasi peneliti terhadap data dilakukan. Verifikasi ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi. (Kaharuddin, 2021)

HASIL DAN DISKUSI

A. Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Islam tinjauan Dimensi Etika, Sains, Ekonomi, dan Politik dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal yang Berkelanjutan

Industri halal memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya integrasi yang komprehensif dari berbagai dimensi yang saling terkait dan saling mendukung, yaitu dimensi etika, sains, ekonomi, dan politik. Dimensi etika memberikan landasan moral dan nilai-nilai yang menjadi panduan dalam praktik industri halal, sementara dimensi sains mendukung inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Dimensi ekonomi berperan dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan pasar, serta memperluas akses ke peluang bisnis. Di sisi lain, dimensi politik menjadi elemen penting dalam menciptakan regulasi, kebijakan, dan dukungan institusi yang memastikan ekosistem industri halal dapat berkembang secara berkelanjutan.

1. Dimensi Etika: Fondasi Nilai dalam Industri Halal

Dimensi etika berperan sebagai fondasi utama yang membentuk karakteristik sekaligus menentukan arah perkembangan industri halal. Etika dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada pemenuhan prinsip-prinsip kehalalan dari perspektif syariah Islam, tetapi juga mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadikan etika sebagai landasan nilai yang memberikan legitimasi moral sekaligus kepercayaan publik terhadap produk dan layanan yang dihasilkan dalam industri halal.

Dimensi etika ini juga dapat dilihat dengan adanya penetapan jaminan produk halal yang telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Dasar hukum untuk jaminan produk halal mengacu pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian mengalami beberapa pembaruan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Jaminan ini disusun, diintegrasikan, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, serta prosedur yang bertujuan menjaga kelangsungan proses produk halal dalam suatu sistem yang dikenal sebagai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).

Sebagai contoh konkret, proses penyembelihan hewan dalam industri halal tidak hanya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan syariah, seperti penyembelihan dengan menyebut nama Allah, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (animal welfare). Praktik ini mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan kewajiban agama dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan. Selain itu, proses produksi dan distribusi produk halal harus dikelola secara transparan, sehingga konsumen memiliki jaminan atas kehalalan dan kualitas produk yang mereka konsumsi. (Hartini dan Malahayatie, 2024).

Sertifikasi halal merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri halal. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti adanya sertifikasi palsu, konflik kepentingan, atau kurangnya pengawasan dalam rantai pasok sering kali muncul dan menjadi ancaman bagi reputasi industri ini. Oleh karena itu, integrasi nilai etika yang kuat sangat diperlukan, baik dalam bentuk regulasi yang lebih ketat maupun penguatan lembaga sertifikasi yang independen dan kredibel.

Lebih jauh, dimensi etika juga harus mendorong pelaku industri halal untuk mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis mereka. Ini berarti bahwa seluruh proses, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap manusia, lingkungan, dan generasi mendatang. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai etika yang kokoh tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk halal di pasar global tetapi juga memperkuat peran industri halal sebagai pilar ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Dimensi Sains: Inovasi dan Teknologi untuk Mendukung Kepercayaan, Efisiensi, dan Keberlanjutan dalam Industri Halal

Dimensi sains berperan krusial dalam mendorong perkembangan industri halal dengan memberikan solusi berbasis teknologi dan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan akan kepercayaan, efisiensi, dan keberlanjutan. Pada konteks ini, teknologi modern menjadi alat yang tidak hanya memastikan kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip syariah tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pelaku industri halal di berbagai sektor. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penggunaan blockchain untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas sepanjang rantai pasok produk halal. Teknologi ini memungkinkan semua pihak, mulai dari

produsen hingga konsumen, untuk memantau dan memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, hingga distribusi telah memenuhi standar halal secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan blockchain, kepercayaan konsumen terhadap produk halal dapat ditingkatkan secara signifikan karena adanya data yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi.

Selain itu, sains juga memainkan peran penting dalam pengembangan alternatif bahan baku halal, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam industri ini. Contoh nyata adalah inovasi dalam menciptakan gelatin berbasis tumbuhan sebagai pengganti gelatin hewan yang tidak halal. Penemuan ini tidak hanya membantu memperluas pilihan bahan baku halal tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan produk-produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Lebih jauh, teknologi sains mendukung proses sertifikasi dan audit halal melalui metode analisis yang lebih canggih. Penggunaan teknik kimia dan biologis memungkinkan pendeteksian bahan non-halal dalam produk dengan akurasi yang tinggi. Proses ini membantu memperkuat validitas sertifikasi halal dan menjamin bahwa produk yang beredar di pasar benar-benar sesuai dengan standar syariah (Andi Amma Ruhmah, et.al, 2024).

Semakin majunya teknologi, sains juga berpotensi mendukung efisiensi operasional dalam industri halal. Teknologi otomatisasi, seperti Internet of Things (IoT), dapat diintegrasikan ke dalam sistem produksi untuk memantau proses secara real-time, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia yang dapat mempengaruhi status halal suatu produk. Di samping itu, pengembangan alat uji halal yang cepat dan portable memberikan kemudahan bagi produsen dan pengawas untuk memastikan kehalalan produk di setiap tahap proses produksi (Andi Amma Ruhmah, et.al, 2024).

Melalui kolaborasi sains dan teknologi, industri halal tidak hanya dapat menjawab tantangan teknis yang ada, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan masa depan yang semakin kompleks. Dengan memanfaatkan sains secara optimal, industri halal mampu menciptakan kepercayaan konsumen yang lebih kuat, efisiensi yang lebih tinggi, dan keberlanjutan yang menjadi dasar pertumbuhan industri di tingkat global.

3. Dimensi Ekonomi: Motor Penggerak Utama Industri Halal

Dari perspektif ekonomi, industri halal memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global, terutama karena tingginya permintaan dari populasi Muslim yang terus meningkat. Berdasarkan proyeksi, konsumen Muslim di seluruh dunia akan menghabiskan lebih dari USD 2,8 triliun pada tahun 2025 untuk berbagai produk dan layanan halal, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, pariwisata, hingga produk farmasi (Nuril Kamiliyah, 2024). Angka ini mencerminkan peluang besar bagi negara-negara dengan basis industri halal yang kuat untuk memanfaatkan potensi ekonomi ini sebagai sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, di tengah potensi besar tersebut, industri halal juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya harmonisasi standar halal internasional. Negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, memiliki standar halal yang beragam, yang tidak hanya membingungkan konsumen tetapi juga menimbulkan hambatan perdagangan lintas negara. Kondisi ini sering kali mengakibatkan biaya tambahan bagi eksportir dan memperlambat pertumbuhan perdagangan internasional produk halal (Baso R, et.al, 2024).

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan integrasi dimensi ekonomi melalui pendekatan yang lebih strategis, seperti peningkatan kerjasama antarnegara dalam penyelarasan standar halal. Langkah ini dapat diwujudkan melalui dialog internasional,

pembentukan konsorsium standar halal global, atau adopsi mekanisme pengakuan bersama antarnegara. Penyelarasan ini tidak hanya akan mengurangi hambatan perdagangan tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing produk halal di pasar global (Baso R, et,al, 2024).

Selain itu, dimensi ekonomi dalam industri halal juga mencakup pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) sebagai bagian dari rantai pasok industri halal. Mengingat IKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara, dukungan yang diberikan kepada mereka untuk memasuki pasar halal, baik melalui pelatihan, akses pembiayaan, maupun penyederhanaan proses sertifikasi halal, dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan (Baso R, et,al, 2024). Dengan demikian, pengembangan IKM halal juga dapat memperkuat kontribusi industri ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih jauh lagi, dimensi ekonomi dalam industri halal tidak hanya berkaitan dengan aspek perdagangan dan konsumsi, tetapi juga harus mencakup investasi yang strategis dalam pengembangan infrastruktur pendukung yang esensial. Investasi ini mencakup pembangunan laboratorium sertifikasi yang modern dan berstandar internasional untuk memastikan kualitas dan keaslian produk halal, penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D) guna mendorong inovasi dalam menciptakan produk halal yang lebih kompetitif, serta pengembangan pasar yang terintegrasi untuk memperluas jangkauan produk halal baik di pasar lokal maupun global. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur tersebut, misalnya melalui alokasi anggaran, insentif fiskal, atau kemitraan publik-swasta. Di sisi lain, sektor swasta juga diharapkan dapat berperan aktif dengan berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, menciptakan peluang kerja, serta mendorong kolaborasi lintas sektor yang dapat memperkuat ekosistem industri halal secara keseluruhan.

Melalui adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, upaya pengembangan infrastruktur ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal, tidak hanya dalam konteks memenuhi permintaan pasar tetapi juga dalam membangun daya saing global. Ketika upaya yang terintegrasi ini dilakukan secara konsisten, industri halal memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kemajuan perekonomian global. Melalui pendekatan ini, industri halal dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat posisi ekonomi negara di kancah internasional, serta memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. Dimensi Politik: Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Kebijakan dan regulasi yang tepat merupakan elemen kunci dalam menciptakan landasan yang kuat untuk pengembangan industri halal yang berkelanjutan. Pada praktiknya di Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian mengalami beberapa pembaruan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjadikan industri halal sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Regulasi ini tidak hanya memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar halal, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha dalam memproduksi

dan memasarkan produk halal. Namun, penerapan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jumlah laboratorium sertifikasi halal dan tenaga ahli yang kompeten dalam melakukan proses audit halal. Hal ini menyebabkan proses sertifikasi sering kali memakan waktu lama dan menjadi beban tambahan, terutama bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Keterbatasan akses ini dapat menghambat IKM dalam memanfaatkan peluang pasar halal, yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah, seperti penyediaan subsidi sertifikasi halal untuk IKM, pembangunan lebih banyak pusat sertifikasi halal di daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang audit halal.

Selain itu, pada tingkat internasional, dimensi politik memainkan peran penting dalam mengatasi fragmentasi standar halal antarnegara. Diplomasi politik dapat dimanfaatkan untuk mendorong harmonisasi regulasi halal melalui kerja sama multilateral. Dalam konteks ini, organisasi internasional seperti *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) dan lembaga terkait lainnya dapat berfungsi sebagai platform untuk menyusun dan mengesahkan standar halal *global* yang dapat diakui secara luas oleh negara-negara anggota. Harmonisasi ini tidak hanya akan memfasilitasi perdagangan lintas negara tetapi juga memperkuat posisi industri halal sebagai sektor yang kompetitif di pasar global (Aqil Irham, 2023).

Kemudian lebih lanjut, peran pemerintah juga penting dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang inklusif melalui kolaborasi lintas sektor. Kebijakan yang efektif perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi yang dapat memberikan masukan berbasis penelitian, pelaku industri yang memahami dinamika pasar, serta masyarakat sebagai konsumen utama produk halal (Aqil Irham, 2023). Pendekatan kolaboratif ini akan membantu menciptakan regulasi yang tidak hanya realistis tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Selain kebijakan di tingkat nasional dan internasional, dimensi politik juga mencakup diplomasi ekonomi yang strategis untuk memperluas akses pasar halal. Pemerintah dapat menjalin kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara mitra dagang untuk membuka peluang ekspor produk halal, baik melalui pengurangan tarif perdagangan maupun penghapusan hambatan non-tarif. Oleh karenanya, dimensi politik tidak hanya mendukung penguatan regulasi di dalam negeri tetapi juga memperluas jangkauan industri halal ke tingkat global.

Melalui penerapan kebijakan dan regulasi yang dirancang secara mendalam serta didukung oleh diplomasi politik yang terencana secara strategis, industri halal memiliki peluang besar untuk berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Kebijakan yang mendukung akan memastikan bahwa pelaku industri, termasuk usaha kecil dan menengah, memiliki akses yang lebih luas ke pasar halal, sementara diplomasi politik dapat membuka jalur kerjasama antarnegara untuk harmonisasi standar halal internasional, yang selama ini menjadi tantangan besar dalam perdagangan lintas batas.

Pendekatan komprehensif ini menjadikan dimensi politik tidak hanya sekadar sebagai kerangka pelindung yang memberikan jaminan hukum dan regulasi bagi keberlanjutan industri halal, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak utama dalam menciptakan ekosistem yang inklusif. Dengan demikian, dimensi politik tidak hanya mendukung penguatan industri halal di pasar domestik, tetapi juga memperluas daya saingnya di kancah global, sehingga mampu

mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif secara holistik terhadap berbagai aspek pembangunan.

Mengintegrasikan keempat dimensi yakni etika, sains, ekonomi, dan politik, merupakan langkah strategis yang memberikan pendekatan holistik untuk memastikan pengembangan industri halal yang berkelanjutan. Setiap dimensi memiliki peran unik namun saling melengkapi dalam membangun ekosistem industri halal yang kokoh dan kompetitif. Etika, sebagai dimensi moral, memberikan landasan nilai yang mendasari seluruh aspek dalam industri halal. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip kehalalan tidak hanya terkait dengan pemenuhan syariat Islam, tetapi juga dengan keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjadikan etika sebagai panduan utama, industri halal dapat menghindari praktik eksploitasi sumber daya, memastikan perlakuan yang adil terhadap tenaga kerja, serta memproduksi barang dan jasa yang ramah lingkungan.

Kemudian pada dimensi Sains, sebagai dimensi teknis, berperan penting dalam menyediakan solusi inovatif yang mendukung pengembangan produk dan layanan halal. Melalui penelitian dan pengembangan (R&D), teknologi modern dapat digunakan untuk memastikan kehalalan produk, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan inovasi baru yang memenuhi kebutuhan pasar global. Misalnya, teknologi blockchain telah mulai digunakan dalam industri halal untuk melacak rantai pasok, sehingga memberikan jaminan transparansi dan kepercayaan konsumen.

Berikutnya pada dimensi Ekonomi, sebagai dimensi insentif, adalah motor penggerak yang memastikan keberlanjutan finansial dari industri halal. Dengan potensi pasar yang mencapai miliaran dolar, integrasi strategi ekonomi dapat mendorong investasi di sektor ini, baik dari pemerintah maupun swasta. Dukungan terhadap Industri Kecil Dan Menengah (IKM), yang menjadi tulang punggung industri halal, melalui pelatihan, subsidi, dan akses ke pasar internasional, akan memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional dan global.

Terakhir pada dimensi Politik, sebagai dimensi regulasi yang dalam hal ini menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri halal. Harmonisasi regulasi antarnegara menjadi krusial dalam membuka akses pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. Selain itu, diplomasi politik dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam menyusun standar halal global yang diakui secara luas. Sinergi antara keempat dimensi ini menjadikan industri halal tidak hanya sebagai sektor strategis dalam perekonomian, tetapi juga sebagai model pembangunan berkelanjutan yang dapat diadopsi oleh industri lain. Etika memberikan dasar moral, sains menyediakan inovasi, ekonomi mendorong insentif, dan politik menciptakan stabilitas regulasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi, industri halal dapat berkembang secara inklusif, menciptakan dampak positif tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga masyarakat global.

Pengembangan industri halal yang berkelanjutan mampu memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi ekonomi, sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan IKM, dan meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor produk halal. Dari perspektif sosial, industri halal mendukung inklusi ekonomi, terutama bagi komunitas-komunitas yang sebelumnya kurang terlibat dalam sektor formal. Dari sisi lingkungan, prinsip-prinsip halal yang sejalan dengan keberlanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem global.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya pengembangan industri halal yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Dengan

menjadikan integrasi nilai-nilai etika, inovasi teknologi, strategi ekonomi, dan kebijakan politik sebagai landasan, industri halal tidak hanya akan menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional tetapi juga menjadi kontribusi nyata terhadap terciptanya dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Industri halal, dengan pendekatannya yang holistik, memiliki potensi untuk menjadi katalisator dalam membangun masa depan yang lebih baik, di mana kebutuhan ekonomi, nilai-nilai spiritual, dan tanggung jawab lingkungan dapat berjalan beriringan. Dengan upaya yang terintegrasi dan komitmen yang berkelanjutan, industri ini dapat menjadi simbol dari harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai moral universal.

B. Tantangan Yang Dihadapi Industri Halal Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Etika, Inovasi Teknologi, Strategi Ekonomi, Dan Harmonisasi Kebijakan Politik Untuk Mencapai Pembangunan Yang Berkelanjutan

Industri halal, dengan potensinya yang besar, memiliki posisi strategis sebagai motor pembangunan berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan. Pengembangan industri ini tidak hanya mengandalkan keberadaan pasar yang besar tetapi juga memerlukan integrasi yang kuat dari keempat dimensi utama: etika, teknologi, ekonomi, dan politik. Meski demikian, implementasi keempat dimensi tersebut menghadapi tantangan signifikan yang dapat memperlambat pertumbuhan industri halal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tantangan Dalam Dimensi Etika

Tantangan dalam dimensi etika dalam industri halal mencakup beberapa aspek yang signifikan, yang tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian dengan prinsip syariah, tetapi juga dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman dan transparansi. Banyak pelaku industri halal yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menerapkan etika di seluruh proses bisnis mereka, mulai dari produksi hingga distribusi. Hal ini menyebabkan adanya praktik yang melanggar prinsip halal, seperti penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan atau penyembelihan hewan yang tidak sesuai dengan standar syariah.

Transparansi dalam proses produksi juga menjadi masalah utama, karena minimnya pengawasan yang memadai dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Selain itu, terdapat pula konflik antara etika dan keuntungan ekonomi, di mana banyak pelaku usaha dihadapkan pada dilema antara menerapkan praktik etis yang berbiaya tinggi dan kebutuhan untuk efisiensi bisnis. Misalnya, penggunaan bahan baku organik atau metode produksi yang ramah lingkungan memang meningkatkan biaya, sehingga tidak semua perusahaan mampu menerapkannya. Tantangan lainnya adalah kurangnya harmonisasi standar etika global, di mana standar halal yang bervariasi antarnegara menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai harmonisasi standar etika global yang lebih inklusif, guna memastikan penerapan prinsip-prinsip etika yang konsisten di seluruh dunia dalam industri halal.

Tantangan dalam dimensi teknologi

Pada dimensi teknologi, meskipun kemajuan teknologi memainkan peran penting untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, terdapat beberapa hambatan signifikan yang menghalangi kemajuan sektor ini. Salah satu tantangan

utama adalah akses yang terbatas terhadap teknologi canggih. Sebagian besar pelaku industri halal terdiri dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi modern, seperti blockchain untuk melacak rantai pasok atau perangkat analisis kimia yang dapat mendeteksi bahan non-halal.

Selain itu, terdapat pula kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Penggunaan teknologi mutakhir memerlukan tenaga kerja yang terampil dan memahami kebutuhan khusus dalam industri halal. Namun, di banyak negara berkembang, ketersediaan tenaga ahli di bidang ini masih terbatas, yang menghambat adopsi teknologi secara luas. Tantangan lainnya adalah tingginya biaya implementasi teknologi, yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama di negara dengan dukungan pembiayaan yang terbatas. Investasi dalam teknologi seperti peralatan produksi modern dan perangkat lunak untuk pengawasan halal memerlukan dana besar, yang menjadi beban berat bagi banyak perusahaan yang ingin mengadopsi teknologi tersebut.

Tantangan Dalam Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan industri halal, namun sejumlah tantangan harus dihadapi untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini. Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan yang semakin ketat di pasar global. Negara-negara seperti Brasil dan Thailand, yang bukan merupakan negara mayoritas Muslim, telah berhasil menjadi pemain utama dalam ekspor produk halal, mendorong negara-negara mayoritas Muslim untuk terus meningkatkan daya saing dan efisiensi mereka agar tetap relevan di pasar internasional.

Selain itu, keterbatasan pembiayaan bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM), yang merupakan mayoritas pelaku industri halal, menjadi kendala signifikan. IKM sering kali kesulitan memperoleh akses pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi standar halal, mengembangkan produk baru, serta memperluas pasar mereka.

Tantangan lainnya adalah harmonisasi standar halal internasional. Perbedaan dalam standar halal antarnegara sering kali menghambat kelancaran proses ekspor dan meningkatkan biaya administrasi, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan industri. Oleh karena itu, inisiatif untuk menyelaraskan standar halal internasional menjadi hal yang mendesak guna mendorong perdagangan yang lebih efisien dan memperkuat daya saing produk halal di pasar global.

Tantangan Dalam Dimensi Politik

Dimensi politik memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan industri halal, namun sejumlah tantangan signifikan masih perlu diatasi. Salah satunya adalah ketidakkonsistenan regulasi antara negara-negara, yang mencakup perbedaan definisi halal hingga persyaratan sertifikasi. Variasi ini menciptakan hambatan dalam perdagangan internasional, sehingga penyelarasan kebijakan antarnegara menjadi langkah strategis untuk mengurangi kendala tersebut dan memastikan kelancaran arus produk halal di pasar global. Selain itu, masih ada kurangnya dukungan kebijakan di tingkat nasional, dengan beberapa negara yang memandang industri halal sebagai sektor sekunder. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran dan kebijakan pendukung yang belum optimal. Padahal, dukungan seperti subsidi atau insentif pajak sangat diperlukan untuk mendorong pelaku usaha agar dapat lebih berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Tantangan lainnya adalah ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan distribusi produk halal. Konflik politik antara negara-negara, seperti sanksi ekonomi atau larangan perdagangan, bisa

sangat merugikan konsumen dan pelaku industri, karena mengganggu kelancaran rantai pasok produk halal ke pasar internasional.

Mengatasi tantangan yang ada dalam keempat dimensi ini yang dalam hal ini seperti pada dimensi etika, teknologi, ekonomi, dan politik, maka menurut penulis tentunya memerlukan sebuah pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, serta komprehensif dari semua pihak yang terlibat. Dimensi etika, yang menjadi landasan utama dalam industri halal, harus diperkuat melalui upaya edukasi yang berkelanjutan dan peningkatan transparansi dalam setiap proses produksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak, mulai dari produsen hingga konsumen, memiliki pemahaman yang jelas mengenai pentingnya nilai-nilai etika dalam industri ini, termasuk kewajiban untuk menjaga kesejahteraan hewan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Di sisi teknologi, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap teknologi mutakhir, seperti blockchain untuk pelacakan rantai pasok atau perangkat analisis bahan, harus menjadi prioritas. Teknologi tersebut harus dijadikan lebih terjangkau dan dapat diakses oleh Industri Kecil Dan Menengah (IKM), yang merupakan tulang punggung industri halal. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang mendukung pembiayaan teknologi dan pelatihan keterampilan yang relevan. Dalam dimensi ekonomi, sektor halal memerlukan dukungan dalam bentuk pembiayaan yang lebih inklusif, terutama bagi IKM yang sering kali terhambat dalam memperoleh akses ke dana untuk memenuhi standar halal dan memperluas pasar. Dukungan finansial ini penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar global.

Adapun di dimensi politik, komitmen yang kuat dari pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan dan regulasi yang harmonis antara negara-negara, guna memastikan bahwa standar halal yang berlaku konsisten dan memfasilitasi perdagangan internasional. Sinergi antara etika, teknologi, ekonomi, dan politik tidak hanya akan memperkuat posisi industri halal sebagai sektor yang strategis, tetapi juga menjadikannya sebagai model pembangunan berkelanjutan yang relevan dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat global. Dengan mengintegrasikan keempat dimensi ini, industri halal dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan sosial, serta pelestarian lingkungan, sekaligus menjadi motor penggerak dalam menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

KESIMPULAN

Integrasi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam dimensi etika, sains, ekonomi, dan politik dalam mendukung pengembangan industri halal yang berkelanjutan adalah bahwa untuk mewujudkan potensi besar industri halal, diperlukan sinergi antara nilai-nilai etika, inovasi sains, kekuatan ekonomi, dan kebijakan politik yang mendukung. Dimensi etika berperan sebagai dasar moral dalam memastikan praktik yang adil dan berkelanjutan. Sains berkontribusi dalam menciptakan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan transparansi, sementara dimensi ekonomi menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar dan daya saing global. Politik, melalui regulasi yang tepat, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk keberlanjutan industri halal. Sinergi antar dimensi ini akan memperkuat posisi industri halal sebagai pilar utama perekonomian yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat internasional. Selain itu, industri halal memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika, inovasi teknologi, strategi ekonomi, dan kebijakan politik. Namun, berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman etika, akses teknologi,

persaingan pasar global, dan ketidakkonsistenan regulasi, masih menghambat pengembangannya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara sektor-sektor tersebut, dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, agar industri halal dapat berkembang lebih pesat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan global.

REFERENSI

- Aulia, R. N., & Fasa, M. I. (2021). Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72–82.
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>
- Iqbal, T., & Ahmad, L. (2024). Menerapkan Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Keamanan Rantai Pasokan: Studi Kasus di Industri Kelapa Sawit. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi*, 1(1), 33–42.
- Istikomah, I., & Rofi, S. (2021). Penguatan Kesadaran Masyarakat Atas Sertifikasi Halal Di Wilayah Glundengan Wuluhan Jember. *Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–8.
- Jannah, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 2758–2771.
- Kamiliyah, N. (2024). DINAMIKA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA: ANALISIS ASPEK PERMINTAAN. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Nurulloh, E. S. (2019). Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 237.
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya'Ulum al-Din*, 20(2), 241–268.